

PERAN MAHASISWA AKUNTANSI SEBAGAI PENDORONG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERSAING DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Desak Nyoman Tri Rani Putri¹
Putu Ayu Anggya Agustina²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
¹e-mail: desaktrirani@yahoo.com/081238932948

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah komunitas ekonomi yang memiliki arah menuju pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Indonesia sebagai bagian dari MEA memiliki sektor UMKM dengan kuantitas yang besar tetapi tidak disertai dengan kualitas yang memadai. UMKM khususnya untuk skala mikro dan kecil memiliki kendala dalam beberapa hal, salah satunya adalah minimnya akses kepada keuangan karena tidak dipahaminya akuntansi dalam pencatatan transaksi bisnis. Bentuk pengatasaan yang dilakukan memerlukan peran akuntan dan akuntansi, mahasiswa akuntansi sebagai salah satu bagian akan menunjukkan perannya dalam KKN termodifikasi Mahasiswa Akuntansi yang akan menjadi gerakan massal, bertahap dan kontinyu untuk mendorong UMKM dapat bersaing dalam MEA melalui tahap-tahap yang sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan.

Kata Kunci: MEA, UMKM, Peran Mahasiswa Akuntansi, KKN

ABSTRACT

ASEAN Economic Community (AEC) is a community that has direction to built an integrated economic region by reducing trade transaction costs, fixing trade and business facilities also improving competitiveness Micro Small Medium Enterprises (MSME) sector. Indonesia is a part of AEC has a large quantity of MSME sector but not followed by equal quality. MSME, especially micro and small scale has some barriers in a few issues, one of them is minimum access to finance because of accountancy lack comprehension in recording business transaction. To do a solving model needs role of accountant and accountancy. Student of accounting as a part of it will show their roles in Accounting Students' modified "KKN" that will become a massive action, step by step and continue to force SMSE to be able to compete in AEC through every step that suitable to Accounting Standard as appointed.

Keywords: AEC, SMSE, Accounting Students' role, KKN

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara *ASEAN* yang berpeluang mengembangkan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan daya saing di sejumlah titik pada sektor, seperti tujuh sektor barang (industri pertanian, industri kayu, industri karet, otomotif, peralatan elektronik, industri tekstil, dan perikanan) dan lima sektor jasa (pelayanan kesehatan, transportasi udara, logistik, pariwisata, dan industri teknologi informasi atau *-e-ASEAN*). Adanya 12 sektor tersebut, dapat memberikan prioritas sebagai implementasi untuk mengembangkan pembangunan di era Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA). MEA adalah salah satu pilar dari tiga pilar yang dibentuk oleh komunitas *ASEAN* itu sendiri. Pembentukan MEA diupayakan bisa memberikan kemudahan dan dapat meningkatkan perannya dalam mengakses informasi pada pasar intra-*ASEAN*. Selain itu, adanya MEA diharapkan memberikan peningkatan keterbukaan dan dapat menyesuaikan peraturan-peraturan yang berlaku serta standardisasi dalam negeri yang diterapkan.

Kondisi demografi yang dialami oleh Indonesia, tidak akan memberikan manfaat jika kualitas SDM masih belum diperbaiki. Tanpa disadari, MEA sudah dipersiapkan dari tahun 2003. Namun, Indonesia masih jauh dari kesiapannya. Hal itu dapat ditunjukkan melalui hasil dari penelitian Lembaga *Center for International Relations Studies (CIReS)* sampai awal tahun 2014, diketahui bahwa masyarakat umum termasuk mahasiswa yang mengetahui MEA hanya sebesar 17% saja (Hamonangan, 2014). Hal itu mengindikasikan bahwa kesadaran mahasiswa ingin meneruskan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi

sangat rendah yang diakibatkan karena kesempatan Indonesia dalam memperoleh pendidikan secara merata masih sulit dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, tenaga kerja Indonesia hanya dipandang sebagai buruh di pasar globalisasi. Gambaran ini menjadi sebuah ironi, terlebih lagi dengan banyaknya jumlah masyarakat produktif yang menjadi pengangguran di Indonesia. Padahal nantinya ketika era MEA hadir, mereka sendiri harus bersaing dengan pencari kerja dari negara lainnya. Maka dari itu, hal yang perlu diperhatikan untuk menyelamatkan negara Indonesia dari kondisi yang prihatin ini adalah menyiapkan tenaga terampil dalam menghadapi MEA.

Melihat kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa kelemahan Indonesia dalam menghadapi MEA terdapat pada Sumber Daya Manusia (SDM). Seharusnya SDM seperti mahasiswa mampu menjadi motor penggerak dalam memajukan perekonomian karena SDM memegang peran penting untuk pembangunan ekonomi kedepannya. Menurut data dari *The Global Competitives Report 2013-2014* oleh *World Economic Forum (WEF)*, perbandingan sikap kompetitif Indonesia dalam berdaya saing masih tergolong lemah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti negara tetangganya yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura. Selain itu, adapun data dari *ASEAN Productivity Organization (APO)* menjelaskan bahwa dari seribu tenaga kerja Indonesia hanya ada sekitar 4,3% yang terampil, berbeda dengan Filipina mempunyai 8,3% tenaga terampil, Malaysia mempunyai 32,6% tenaga terampil, dan Singapura mempunyai 34,7% tenaga terampil. Kemudian pada struktur pasar, ditunjukkan bahwa tenaga

kerja lebih banyak menggunakan pekerja lulusan SD (80%), sedangkan pekerja lulusan Perguruan Tinggi hanya 7%.

Sektor yang dianggap mampu mengatasi hal ini, harus segera dioptimalkan untuk mengatasi jumlah pengangguran sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di *ASEAN* khususnya. Sektor tersebut adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), usaha bisnis yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi pengangguran yang menyebar di negeri ini. Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dapat mendukung UMKM dan program pengembangan kewirausahaan dalam berdaya saing (RPJMN, 2004).

Berdasarkan realita, perkembangan UMKM pada tahun 2013 di Indonesia dapat ditunjukkan melalui data (pada Gambar 1.) sebagai berikut.



Gambar 1. Jumlah UMKM di Indonesia

Sumber: Departemen Koperasi dan UKM Indonesia, 2013

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 telah ada 55.856.176 usaha mikro, 629.418 usaha kecil, 48.997 usaha menengah dan 4.968 usaha besar.

Adanya jumlah ini dapat diartikan bahwa jumlah UMKM yang telah tercatat di Indonesia seluruhnya ada sebanyak 56.534.591 unit dengan usaha besar hanya sejumlah 4.968 unit. Hal ini menandakan bahwa kuantitas UMKM sebesar 99,99% sangat mendominasi dari keseluruhan pelaku usaha yang ada di Indonesia dibandingkan dengan sektor usaha besar yang telah berdiri di Indonesia sendiri hanya memiliki kuantitas yang tidak lebih dari 1%. Situs dari BUMN (2014), Provinsi Bali tercatat ada sekitar 210 ribu UMKM yang menjadi penopang perekonomian daerah tersebut (www.bumn.go.id).

Scarborough dan Zimmerer (2005) menyatakan bahwa pembenahan atas krisis ekonomi selama tujuh tahun di Indonesia tidak hanya melihat bukti dari peranan usaha besar saja, tetapi juga melihat dari sektor UMKM yang mempunyai pertahanan lebih baik. Namun, dengan jumlah sektor UMKM yang besar belum mampu membuat sektor ini dipandang mampu turut andil secara aktif dalam perdagangan internasional. Hal ini, dilihat dari gambaran total ekspor UMKM yang menunjukkan bahwa pada sub non migas, entitas UMKM tidak terlihat memberikan kontribusi, sebab hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2007 banyaknya entitas UMKM adalah sebesar 19,99%, sedangkan pada tahun 2008 banyaknya entitas UMKM adalah sebesar 20,17% sehingga akan diperkirakan tidak mengalami perkembangan yang signifikan hingga 2013. Keadaan ini menjelaskan suatu entitas UMKM hanya menitikfokuskan diri pada pasar dalam negeri tetapi masih memerlukan tembusan pasar ekspor karena masih rendah dan memerlukan peningkatan.

Peranan UMKM masih terbilang baik di perekonomian nasional jika dipandang dari jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dapat memberikan kontribusi yang besar dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan tambahan dari nilai ekspor. Stel, *et al.* (2004) menyatakan bahwa UMKM mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang perekonomian nasional. Peranan UMKM terutama dilihat dari indikator seperti dapat memperbanyak kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, membangun perekonomian di pedesaan, dan meningkatkan ekspor nonmigas. Berdasarkan data kontribusi UMKM 2012 pencapaian jumlah UMKM dapat ditunjukkan mencapai sebesar 56.534.592 unit atau 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh UMKM mencapai 107.657.509 orang atau sebesar 97,16% dari total tenaga kerja di Indonesia. Sedangkan pencapaian kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB sekitar Rp 4.869.568,1 Milyar atau sebesar 59,08% dari total PDB atas dasar harga berlaku, serta terkait dengan hasil dari pembentukan nilai ekspor, UMKM yang memberikan nilai sebesar Rp 167 triliun atau sebesar 14,06% (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2012), seperti pada pernyataan mankiw berikut.

“Kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yakni mencapai sekitar 56,7 persen, di mana PDB adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu negara pada periode tertentu” (Mankiw, 2013: 6).

Berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitas UMKM berpotensi yang sangat besar untuk terus berkembang dan bersaing dengan negara tetangga di wilayah ASEAN khususnya di era MEA ini namun belum didukung secara kualitas atau dari kemampuan UMKM itu sendiri.

Ketidakmampuan UMKM untuk menembus pasar global atau ekspor tersebut diakibatkan pula oleh keterbatasan akses keuangan yang tercermin dari data yang diperoleh pada Gambar 1. Berdasarkan situs kementerian koperasi (2013) diketahui bahwa UMKM yang telah memakai dan mengakses pembiayaan perbankan baru sebesar 30 persen dari keseluruhan UMKM yang berkisar 56,54 juta unit jumlahnya. Adanya hal itu, bank dapat melihat permasalahan UMKM dilihat dari kekayaan usaha, seperti dari aspek keuangan atau aspek pemasaran serta tenaga kerja (Bank Indonesia, 2009). Ini disimpulkan bahwa ketika sulitnya pengelolaan keuangan UMKM ditimbulkan karena persepsi yang belum sama antara syarat yang harus dipenuhi dari bank serta apa yang didapatkan oleh UMKM, terkait laporan keuangan dan perencanaan mengenai peningkatan akses keuangan UMKM (Bank Indonesia, 2009).

Seiring berjalannya waktu, melalui Budi Utomo (1908), Raden Sutomo berusaha mengembangkan Koperasi Rumah Tangga. Namun, usahanya kurang memiliki hasil yang baik karena kesadaran masyarakat terhadap manfaat Koperasi masih lemah. Adanya *The Studi Club 1928* sebagai kelompok kaum intelektual, maka perlunya kesadaran Indonesia terhadap adanya koperasi karena koperasi ini sebagai salah satu alat perjuangan bangsa. Adapun jumlah Koperasi di Indonesia di era tahun 1939 mencapai 1.712 buah, dengan jumlah pendaftar sebanyak 172 buah dan jumlah anggota sekitar 14.134 orang. Hal inilah yang seharusnya dikembangkan dalam memupuk kesadaran di dalam masyarakat Indonesia, seperti pada pernyataan Baswir berikut.

“Ketika pada zaman Belanda, tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara sangat diperlukan sebagai pelopor dalam penggerakan nasional

semakin menggiatkan usahanya untuk menggunakan Koperasi sebagai sarana perjuangan” (Baswir, 2013: 14).

Berdasarkan fenomena tersebut meyakinkan bahwa akuntansi memiliki peran penting untuk dapat mendorong sektor UMKM ini agar mampu bersaing dalam era MEA. Peran Akuntansi atau akuntan perlu diimplementasikan dalam gerakan yang nantinya secara kontinyu mampu mendorong UMKM tersebut dapat bersaing dalam MEA. Melalui penelitian ini permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: 1) bagaimana peran Mahasiswa Akuntansi sebagai pendorong UMKM bersaing dalam era MEA? 2) bagaimana pelaksanaan peran Mahasiswa Akuntansi sebagai pendorong UMKM bersaing dalam era MEA?

Perlunya pengarahannya untuk MEA agar terbentuk suatu integrasi ekonomi di Indonesia. Hal itu dilakukan dengan mengurangi *logistic cost*, membenahi segala fasilitas perdagangan dan bisnis, serta mendorong sektor UMKM agar mampu berdaya saing yang tinggi. MEA yang sudah diberlakukan ini bertujuan dapat menghadirkan pasar tunggal berbasis produksi yang memberikan kesejahteraan, mempunyai daya saing yang tinggi, stabil, dan terintegrasi secara ekonomi dengan aturan yang efektif untuk perdagangan dan investasi, serta dapat melaksanakan kebebasan impor dan ekspor barang, jasa, investasi, dan modal dengan mendapatkan fasilitas dari pelaku usaha dan tenaga kerja yang bebas. Tercapainya tujuan dari pemberlakuan MEA ini, sangat diperlukan kesiapan maksimal dengan melihat adanya potensi dan ketika menghadapi tantangan serta perlu memperhatikan pelaksanaan strategi yang tepat.

Salah satu tokoh dari ahli ekonomi klasik adalah David Ricardo yang mengemukakan pendapatnya tentang kegiatan melakukan perdagangan luar negeri

yang lebih logis dengan menerangkan pentingnya perdagangan bebas atau luar negeri tersebut adalah cara yang dilakukan untuk mengembangkan perekonomian di suatu negara. Sistem perdagangan luar negeri yang mana setiap negara melaksanakan perdagangan tanpa mendapatkan halangan dalam arti ketika berdagang dapat bebas melakukan transaksi. Pada dasarnya tidak terdapat pemberlakuan sembarang pajak dan aturan terkait melarang ekspor dan impor dalam perdagangan bebas (Sukirno, 2011: 360).

Perdagangan bebas yang nantinya diberlakukan ketika menyongsong kehadiran MEA ini akan memberikan *opportunity* bagi negara *ASEAN* yang hendak memperluas batasan skala ekonomi. Hal ini, diupayakan dapat mengurangi ketidakseimbangan sosial ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, memberikan destinasi untuk investor dan wisatawan, mengurangi *logistic cost*, serta membenahi fasilitas perdagangan dan bisnis. Selain itu, keberadaan MEA dapat menyediakan peluang sehingga dapat meningkatkan jalur akses pasar intra-*ASEAN* serta transparansi dan dengan cepat menyesuaikan aturan yang berstandarisasi domestik. Komunitas *ASEAN* yang sudah dibentuk ini sesungguhnya diawali dengan komitmen dari para pemimpin *ASEAN*. Hal itu dapat dilihat dari adanya penandatanganan *ASEAN Vision 2020* pada tahun 1997 di Kuala Lumpur. Hal itu menjelaskan tujuan pembentukan komunitas MEA yang sebagaimana Negara anggota *ASEAN* dicita-citakan sebagai salah satu komunitas berpikiran untuk maju, damai, makmur, dan dapat menstabilkan serta dapat dipersatukan melalui hubungan kerja sama.

Beberapa potensi Indonesia untuk merebut persaingan MEA 2015, menurut Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, diantaranya (www.setneg.go.id) adalah pertama, Indonesia dikatakan sebagai pasar potensial karena mempunyai wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang terbanyak (40% dari total penduduk *ASEAN*). Melihat hal itu, Indonesia dipandang sebagai negara ekonomi berproduktif dan berdinamis sehingga dapat mengembangkan pasar *ASEAN* di masa sebab mempunyai harapan dalam berkesempatan menjadi penguasa di pasar dan saat berinvestasi.

Berdasarkan potensi-potensi yang ada, seharusnya Indonesia dapat lebih siap untuk menghadapi MEA terlebih lagi dengan adanya pelaku ekonomi dalam skala usaha yang lebih kecil yang kemudian dikenal dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya UMKM ini membuat Indonesia lebih terarah dalam mengolah SDM, seperti pada pernyataan Rofiq berikut.

“Sektor ini akan diarahkan untuk dapat memenuhi pasar domestik dan selanjutnya secara mandiri dan secara konservatif akan dapat turut memasuki kancah perdagangan internasional atau perdagangan bebas di *ASEAN*” (Rofiq, 2014 : 127).

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), tepatnya ada pada pasal 1, UMKM (www.depkop.go.id) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang dapat berdiri dengan sendiri. Kegiatan dari usaha ini dilakukan oleh perorangan atau badan usaha bukan anak perusahaan atau bukan cabang, menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Usaha Menengah merupakan usaha produktif berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Adapun kriteria-kriteria yang sesuai dengan UMKM, yang dapat dijelaskan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, pada pasal 6 sebagai berikut.

Tabel 1.
Kriteria UMKM

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Milyar – 50 Miliar

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (<http://www.depkop.go.id/>)

Berdasarkan kriteria UMKM pada Tabel 1 terdapat kriteria yang berbeda-beda yang di nilai menurut nominal yang menjadi kriteria dari setiap usaha. Sewaktu-waktu nilai nominal yang ada pada kriteria UMKM ini, dapat diganti sesuai dengan peraturan presiden, (Oscar dkk., 2010: 3). Menurut Wati, sejak krisis ekonomi melanda di tahun 1997, sekitar 80% usaha besar mengalami likuidasi yang menyebabkan usaha besar tersebut perlu melakukan PHK pada karyawan (www.academia.edu). Adanya perhatian dari pemerintah, maka melalui

sektor UMKM inilah dapat membangkitkan perekonomian negara secara perlahan-lahan. Hal itu ditunjukkan dengan perkembangan positif dalam menunjang perekonomian negara ketika mengalami kejadian-kejadian yang memprihatinkan seperti krisis ekonomi.

Tujuan Pemberdayaan UMKM tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan tujuan pemberdayaan UMKM: a) terwujudnya struktur ekonomi berskala nasional yang mencerminkan keseimbangan, perkembangan, dan keadilan, b) menumbuhkembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang mandiri, dan c) memberikan peningkatan peran dari UMKM pada suatu daerah dengan menciptakan lapangan pekerjaan, pendapatan yang diberikan rata, serta menumbuhkan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

Adapun alasan-alasan penting mengapa UMKM sangat berpeluang menunjang kekuatan ekonomi dalam skala nasional diantaranya adalah yang pertama jumlah UMKM yang sangat banyak dan jumlahnya lebih dominan dari pelaku di tingkat nasional. UMKM juga terdapat hampir di seluruh sektor usaha dan terlebih lagi berkembang dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan usaha ini memiliki peranan yang sangat penting berdasarkan kenyataan yang berkembang saat ini di mana UMKM ini berkembang menjadi wahana yang dapat mempercepat proses pemerataan baik antarsektor maupun antarwilayah.

Jumlah UMKM yang sangat besar dan penyebarannya yang luas di wilayah Indonesia dapat dipastikan bahwa usaha ini juga akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga terlihat dalam ukuran relatif UMKM dapat diakui banyak

menyerap tenaga kerja walaupun secara absolut pelaku usaha besar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Kemudian dilihat dari beberapa hal yakni yang pertama dari skala usaha yang tergolong kecil tidak menjadi hambatan yang mutlak dalam keberlangsungan UMKM yang berdiri di Indonesia kini melainkan melahirkan sifat fleksibilitas yang tinggi, karena dengan sifat fleksibel tersebut mampu membuat UMKM dengan mudah dapat menyesuaikan diri dengan cepat pada perubahan lingkungan dan menjadi katup pengaman di saat krisis melanda perekonomian negara. Hal ini benar terjadi di tahun 1998 pada saat Indonesia terkena imbas krisis ekonomi yang berawal dari spekulatif *Bath Thailand* dan berakhir pada para investor asing berbalik arah meninggalkan Indonesia sehingga negeri ini dilanda krisis hebat, pada saat itulah peran UMKM diberdayakan dan mampu menjadi katup pengaman hingga kondisi kembali normal. Oleh karena itu sudah selayaknya UMKM memperoleh pemberdayaan dan kemudahan dalam melebarkan sayapnya.

Kontribusi UMKM dalam perdagangan bebas memiliki peranan dalam melaksanakan *subcontracting*. UMKM yang berjalan di negara maju seperti Eropa, Jepang dan AS keberadaannya tidak terpisah seperti yang terlihat di Indonesia selama ini melainkan merupakan suatu kesatuan di mana terdapat saling terintegrasinya antara usaha sektor kecil dan sektor besar dalam mendukung daya saing masing-masing dalam perdagangan bebas.

Berbagai negara di dunia pengembangan UMKM sangat identik dan terkait dengan upaya-upaya pemecahan masalah ekonomi yang banyak terjadi di masyarakat terutamanya masyarakat menengah ke bawah seperti masalah

kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun dampak positifnya bukan hanya dapat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah sendiri melainkan dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat apabila usaha sektor kecil ini mendapatkan dorongan dan dukungan yang dapat menjaga eksistensinya dalam perkembangan dunia usaha sekarang ini.

Alasan-alasan tersebut merupakan keunggulan UMKM dalam berdaya saing pada persaingan perdagangan bebas khususnya di *ASEAN* ini, namun dalam kenyataannya UMKM belum mampu secara optimal berkembang seperti halnya dengan ketidakmampuan UMKM untuk menembus pasar global atau ekspor tersebut diakibatkan pula oleh keterbatasan akses keuangan yang tercermin dari data yang diperoleh dari situs kementerian koperasi diketahui bahwa UMKM yang telah memakai dan mengakses pembiayaan perbankan baru sebesar 30 persen dari keseluruhan UMKM yang berkisar 56,54 juta unit jumlahnya. Adanya hal itu, bank dapat melihat permasalahan UMKM dilihat melalui kekayaan usaha, seperti dari aspek keuangan atau aspek pemasaran serta tenaga kerja (Bank Indonesia, 2009).

Peluang-peluang UMKM dapat diukur melalui dua indikator. Pertama, karena adanya potensi pasar. Kedua, karena adanya kebijakan pemerintah mengenai UMKM. Potensi pasar yang dimiliki UMKM sangat besar di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari pencapaian jumlah populasi penduduk Indonesia sebesar lebih dari 250 jiwa, maka basis pelanggan dari UMKM juga besar. Seiring jalannya waktu, para pelaku UMKM harus kritis melihat peluang pasar yang ada. Kreativitas dan inovasi sangat diperlukan dalam menumbuhkembangkan usaha

agar menghasilkan produk yang dapat memikat daya tarik konsumen. Kebijakan pemerintah berdasarkan pada Kementerian Negara Koperasi dan UMKM menggambarkan bahwa saat ini Indonesia mempunyai hampir 50 juta unit UMKM, (Oscar, dkk; 2010: 9). Hal itu, dapat diestimasi besarnya persentase sektor UMKM ada sebanyak 99 % dari total unit usaha yang masih beroperasi. Dilihat dari UMKM tersebut, usaha mikro adalah usaha yang paling banyak dengan jumlah 47.702.310 atau sekitar 95 % lebih sehingga dapat dikatakan mayoritas usaha di Indonesia adalah usaha mikro. Menurut Hadiyati (2010), berdasarkan data BPS, UMKM mempunyai tujuh kekurangan dan masalah, yaitu: keperluan modal yang sulit didapat, kesulitan pemasaran, persaingan yang semakin ketat, kesulitan mendapatkan bahan baku, pemahaman teknik produksi dan *skill* yang masih kurang, kurangnya keterampilan sdm, dan kurangnya wawasan dalam manajemen, terkait keuangan dan akuntansi.

Berikut adalah indikator utama dalam menentukan oportunitis seorang pengusaha terkait dukungan pemerintah atas UMKM dalam pasal 8, yakni bahwa aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ayat (1) huruf a ditujukan untuk memperluas sumber dana dan memberikan fasilitas umkm untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan *nonbank*, memperbanyak lembaga pendanaan dan jaringannya sehingga mudah diakses oleh UMKM, memberikan kemudahan untuk mendapatkan pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif serta membantu para pelaku UMKM.

Berdasarkan fenomena tersebut meyakinkan bahwa akuntansi memiliki peran yang signifikan untuk dapat mendorong sektor UMKM ini agar mampu

bersaing dalam era MEA. Penggunaan akuntansi menjadi salah satu prasyarat atau cara untuk dapat memudahkan pelaku UMKM dalam menjalankan proses bisnisnya sehingga tidak cukup hanya pemerintah yang menjalankan fungsinya sehingga dibutuhkan kekuatan yang lebih massal untuk dapat andil dalam pergerakannya. Kekuatan tersebut berasal dari mahasiswa akuntansi yang belum terbilang professional tetapi memiliki kompetensi untuk menuju ke arah tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa mahasiswa akuntansi adalah salah satu dari beberapa pihak yang berkepentingan dalam etika profesi akuntansi selain akuntan publik dan penyedia informasi akuntansi. Hal yang seharusnya dipahami oleh mahasiswa akuntansi mengenai informasi akuntansi, seperti pada pernyataan Mardiasmo berikut.

“Informasi akuntansi ini dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi” (Mardiasmo, 2009: 15).

Kajian yang mendukung peran mahasiswa akuntansi dapat dimanfaatkan dalam mendorong UMKM dijelaskan sebagai berikut. Pemahaman seorang mahasiswa dalam memahami mata kuliah tidak hanya dilihat dari nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut, tetapi melihat apakah mahasiswa tersebut mengerti terkait konsep yang sudah diberikan.

“Mahasiswa dapat dikatakan menguasai atau memahami akuntansi bila ilmu akuntansi yang telah diperolehnya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau dapat dipraktekkan di dunia kerja” (Budhiyanto dan Nugroho, 2004: 260). “Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur

aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan” (Jusup, 2011: 4).

Menurut Budhiyanto dan Nugroho (2004), pemahaman akuntansi mahasiswa dilihat dari seberapa paham seorang mahasiswa terkait hal yang sudah dipelajari pada konteks mata kuliah akuntansi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Seorang mahasiswa memahami akuntansi tidak hanya dilihat dari nilai-nilai yang didapatkan dalam mata kuliah tetapi dilihat juga dari mengertinya mahasiswa dalam menguasai konsep terkait.

Berdasarkan kajian tersebut ditegaskan bahwa pemahaman mahasiswa akuntansi dapat dilihat dari ilmu akuntansi yang telah diperoleh dapat diterapkan pada kehidupan masyarakat atau dipraktikkan ketika bekerja sehingga besar kemungkinan apabila peran mahasiswa akuntansi akan mampu mendorong UMKM dalam bersaing ketika menghadapi MEA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut *ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD) 2004 – 2014* terdapat beberapa program atau cara pengembangan untuk UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, diantaranya adalah pengembangan kewirausahaan, peningkatan *skill* pemasaran, pemberian akses keuangan, akses teknologi dan mewujudkan kebijakan yang kondusif.

Kelima program tersebut yang memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan UMKM adalah aspek kepada keuangan, hal ini dikarenakan berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Koperasi dan UKM Indonesia (www.depkop.go.id) dari keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia yang telah mengakses pembiayaan perbankan baru sejumlah 30%. Permasalahan inilah yang

membuat peran akuntan sangat diperlukan untuk turut mendorong akses UMKM kepada keuangan.

Menurut Kajian pada Buku Kajian Keuangan Bank Indonesia dalam situsnya (bi.go.id) jika dikaitkan pada sistem akses untuk keuangan tersebut, UMKM masih mempunyai keterbatasan (*gap*). Terdapat tiga kendala (*gap*) antara UMKM dan perbankan, yakni: *gap* informasi terkait dengan *gap* antara informasi produk bank dengan prosedur perbankan umkm, *gap* formalitas terkait *gap* antara formalitas dokumen dengan memenuhi persyaratan bagi umkm saat ini dan *gap* skala usaha terkait jumlah kredit yang diharapkan umkm dengan yang direalisasikan oleh bank.

Peran mahasiswa akuntansi dalam hal ini adalah mengatasi kendala/*gap* yang terjadi antara UMKM dan perbankan, diantaranya 1) memberikan informasi produk bank serta prosedur perbankan, 2) formalitas dokumen serta persyaratan yang harus dipenuhi saat ini oleh UMKM, 3) besarnya kredit yang diharapkan UMKM dan yang direalisasikan oleh bank. Berikut adalah pembahasan yang akan dibahas secara detail terkait dengan peran mahasiswa dalam mengatasi kendala (*gap*) yang terjadi antara UMKM dan perbankan.

Peran pertama; mahasiswa akuntansi memberikan informasi produk bank serta prosedur perbankan. Hal ini ditujukan dengan pengenalan program-program sehubungan dengan permodalan pelaku usaha UMKM. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebuah program pemerintah yang menyediakan dana untuk pelaku UMKM melalui bank-bank yang telah melakukan kesepakatan dengan pemerintah dengan jumlah dana berbeda di setiap banknya, melalui bank penyalur

dana inilah pelaku usaha kecil tersebut mengajukan permohonan kredit yang akan dikaji kembali apakah telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bank terkait UMKM yang dipersiapkan menerima KUR wajib memberikan berkas yang mendukung persyaratan kredit yang diputuskan Bank Pelaksana KUR. Syarat dan ketentuan untuk dapat memperoleh pembiayaan tersebut adalah identitas diri penerima KUR, seperti KTP, KK, dan keterangan domisili, legalitas usaha seperti akte pendirian usaha dan data usaha, perizinan usaha seperti SIUP, TDP, dan Izin gangguan HO, laporan keuangan usaha, proposal usaha serta persyaratan lain sesuai ketentuan bank yang mungkin di tambahkan seperti jaminan aset tidak bergerak.

Setelah persyaratan terpenuhi bank pelaksana KUR akan melaksanakan penilaian kembali terkait usulan kredit yang diajukan UMKM penerima KUR. Berdasarkan komite KUR bagian dari Kementerian Koperasi dan UKM disebutkan bahwa UMKM dalam proses perolehan pembiayaan tersebut harus meberikan agunan kepada bank pelaksana berupa Agunan Pokok seperti kelayakan usaha yang mampu dibiayai sendiri serta Agunan Tambahan yang ditentukan bank pelaksana, seperti surat-suarat tanah dan BPKB mobil.

Pada tahap ini, sering kali pelaku UMKM mengalami kesulitan karena pada kenyataannya pelaku UMKM tidak memiliki aset dengan nilai tertentu yang dapat meyakinkan pihak bank pelaksana sehingga muncul permasalahan di mana permohonan pembiayaan tersebut tidak diprioritaskan bila pelaku UMKM tersebut tidak dapat memberikan jaminan yang mencukupi untuk menghindari profil risiko yang terbilang tinggi pada UMKM.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan ini pemerintah membuat solusi dengan adanya fasilitas jaminan untuk membantu usaha mikro ini dapat memperoleh kredit dengan lebih mudah. Pemerintah membentuk hubungan mitra dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo Persero) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo Persero) sehingga pengusaha tidak harus mempunyai agunan untuk memperoleh KUR.

Peran kedua; mahasiswa memberitahukan formalitas dokumen serta persyaratan yang harus dipenuhi saat ini oleh UMKM. Setelah pada peran sebelumnya mahasiswa telah menyampaikan pada pengusaha mikro dan kecil yang menjadi sasaran tentang bagaimana tahapan atau alur memperoleh dana tersebut, maka selanjutnya peran mahasiswa akuntansi untuk dapat mengimplementasikan ilmu akuntansinya dalam pemenuhan prasyarat kredit. Salah satu prasyarat utamanya adalah laporan keuangan yang memenuhi standar yang *bankable*.

Pada peran ini, mahasiswa mengajarkan atau menerangkan standar yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Mahasiswa juga mengarahkan pengusaha untuk mulai menerapkan standar akuntansi yang sesuai yakni SAK ETAP, di mana standar tersebut telah direkomendasikan untuk diterima bank-bank pelaksana KUR ataupun bank dengan produk kredit lainnya.

Peran ketiga; mahasiswa memberikan pemahaman mengenai pengabulan permohonan dana berbanding lurus dengan ukuran usaha yang dijalankan. Semakin besar ukuran usaha maka semakin besar juga permohonan dana yang

bisa diajukan begitu juga sebaliknya. Pelaku usaha kecil yang mengajukan dana yang besar akan menimbulkan kecurigaan karena akan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki.

Besarnya jumlah permohonan dana juga akan berpengaruh dengan jumlah agunan yang diminta oleh bank Pelaksana KUR ataupun kredit lainnya kepada pelaku usaha. Hal ini penting karena perbankan juga perlu mendapat jaminan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengusaha-pengusaha UMKM tersebut sehingga pengusaha harus menyadari hal tersebut dan bisa memperkirakan permohonan dana yang diperlukan dengan baik.

Pelaksanaan peran mahasiswa akuntansi sebagai pendorong UMKM bersaing dalam era MEA hanya bisa terlaksana apabila dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan oleh karena itu dibutuhkan gerakan yang lebih massal, langsung mengena pada sasaran dan bertahap atau berkelanjutan sesuai dengan tahapan yang dibutuhkan. Gerakan tersebut diwujudkan mahasiswa akuntansi melalui modifikasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang wajib diikuti seluruh mahasiswa sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada modifikasi KKN inilah ketiga peran mahasiswa akuntansi sebagai pendorong UMKM dalam MEA tersebut diaplikasikan.

Konsep dari gerakan Mahasiswa akuntansi ini adalah pelaksanaan KKN mahasiswa yang dimodifikasi dengan adanya proyek khusus untuk mahasiswa akuntansi sebagai bentuk persiapan sejak dini menghadapi MEA. Gerakan ini diawali dengan ditentukannya daerah pelaksanaan KKN di mana terdapat pelaku usaha UMKM khususnya skala usaha mikro dan kecil. Kemudian apabila pada

umumnya satu kelompok KKN terdiri dari mahasiswa berbagai jurusan ataupun fakultas maka setidaknya ada 2 (dua) orang dalam tim yang merupakan mahasiswa akuntansi sehingga tetap dapat menjalankan gerakan pada sasaran yang dituju. Lebih baik lagi apabila mahasiswa akuntansi mampu mengarahkan rekan tim yang lainnya untuk membantu pelaku usaha kecil tersebut dalam segi lain di luar akuntansi. Gerakan ini dilakukan pada saat KKN karena untuk memudahkan waktu dan sasaran pelaksanaan selain itu dengan bersamaan KKN maka program ini akan dapat terlaksana secara serentak di Indonesia, massal dan kontinyu terlebih lagi KKN diadakan 3 kali dalam setahun pada semester genap, ganjil dan khusus.

Teknis pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahap menyerupai KKN yang mana gerakan ini akan berlangsung selama pelaksanaan KKN. Dalam pemilihan tempat KKN ditetapkan oleh pihak yang berkaitan sehingga diperlukan bantuan berbagai pihak, baik dari pihak universitas maupun pemerintah dalam gerakan ini, karena akan dilakukan penelitian atau pengkajian tempat terlebih dahulu agar disetiap tempat atau pilihan input lokasi sudah terdapat pelaku UMKM yang sesuai dengan kriteria.

Kriteria UMKM yang menjadi sasaran gerakan ini adalah dikhususkan pada usaha skala mikro dan kecil yang dianggap belum memahami pencatatan akuntansi bahkan belum melakukan pencatatan transaksi dalam proses bisnisnya. Usaha tersebut juga yang belum pernah mendapatkan permodalan dari perbankan baik melalui KUR ataupun produk perbankan lainnya. Berikut adalah 3 (tiga) tahapan pelaksanaan gerakan ini.

Tahap pertama; pada tahap ini mahasiswa melakukan registrasi dan penginputan daerah tempat dilaksanakannya KKN yang dimodifikasi. Mahasiswa memilih lokasi yang telah ditentukan dan pada masing-masing daerah akan dipilih UMKM khususnya usaha mikro dan kecil yang akan menjadi sasaran untuk mendapatkan pelatihan dari mahasiswa akuntansi sehubungan akses kepada keuangan yang memerlukan laporan keuangan yang *bankable* agar memudahkan perusahaan dalam kredit usaha dan sebagainya.

Tahap kedua; mahasiswa dalam menjalankan gerakan ini tentunya bertujuan untuk membantu pengusaha utamanya usaha mikro dan kecil yang pada umumnya belum mampu melakukan proses akuntansi dengan baik bahkan belum menerapkan pencatatan akuntansi di dalamnya. Sebagai mahasiswa yang memiliki kapasitas yang masih terbatas maka setiap tim atau kelompok diharuskan memiliki pembimbing yang dapat memberikan bimbingan atau pembekalan kepada mahasiswa sebelum menjalankan perannya dalam gerakan nantinya.

Pembimbing tersebut merupakan dosen ataupun akademisi pada universitas terkait yang tentu mengetahui diadakannya program atau gerakan baru ini. Sebelum mahasiswa melaksanakan perannya dalam gerakan tersebut, pembimbing tersebutlah yang akan memberikan pembekalan sehubungan materi yang akan disampaikan mahasiswa kepada pelaku UMKM. Hal ini penting karena sebelum mahasiswa mampu mengajarkan proses akuntansi yang semestinya maka mahasiswa harus mengerti betul terlebih dahulu.

Tahap ketiga; tahap terakhir ini merupakan tahap pengimplementasian peran mahasiswa akuntansi di dalam gerakan. Pengimplementasian ini adalah dengan

mengajarkan atau melatih pelaku usaha khususnya mikro dan kecil untuk dapat melakukan pencatatan akuntansi yang baik. Usaha menengah dianggap telah mampu melaksanakan pencatatan akuntansi dengan baik namun tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa dapat menekankan kembali pentingnya melakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi.

Tahap ketiga ini terbagi lagi menjadi 5 tahap yang mana tahapan ini merupakan hasil kajian Bank Indonesia pada tahun 2009 yang dipersiapkan untuk standar minimum UMKM, maka dianggap sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Oleh karena itu, mahasiswa dapat lebih mudah mengimplementasikan perannya berdasarkan tahapan berikut. Tahapan berikut dikutip dari Buku Kajian Mengenai Rumusan Standar Minimum Laporan Keuangan pada situs Bank Indonesia (bi.go.id), dengan lima tahapan sebagai berikut.

Tahap pertama adalah introduksi pencatatan transaksi. Tahapan ini menjelaskan bagaimana mahasiswa akan mengkampanyekan perihal. Ketikan akan menjelaskan perihal tersebut, diperlukan setiap unit usaha melakukan pencatatan transaksi, walaupun bentuk usahanya sederhana sehingga setelah itu dapat memunculkan kesadaran atau pemahaman bagi pelaku UMKM terkait manfaat dan pentingnya pencatatan transaksi. Hal ini penting untuk orang yang melakukan usaha perorangan atau dalam kerja sama dengan pihak ketiga, seperti lembaga perijinan dan perbankan. Diharapkan ini akan menjadi poin penting untuk langkah berikutnya.

Tahap kedua adalah pencatatan arus keluar-masuk kas. Pencatatan kas dalam hal ini sangat berguna untuk mengetahui apakah terdapat selisih kurang (rugi) atau selisih lebih (laba) serta untuk mengungkapkan total kas yang dimiliki. Pada tahapan ini mahasiswa akuntansi akan mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan juga hasil pembekalan dari dosen pembimbing. Diharapkan pada tahapan pencatatan menjadi target minimal usaha dengan skala Mikro dapat mencapai hal tersebut.

Tahap ketiga adalah pencatatan transaksi lainnya. Proses pencatatan transaksi adalah tahapan selanjutnya yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan usaha pada umumnya, seperti pencatatan penjualan, pencatatan persediaan barang dagang, pencatatan hutang dan pencatatan piutang. Diharapkan entitas UMKM dengan skala Mikro dapat memahami tahapan ini.

Tahap keempat adalah penyusunan laporan keuangan. Pada tahapan ini mahasiswa telah mengajarkan hingga seluruh aspek minimal dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi sehingga mampu diarahkan untuk membuat laporan keuangan walaupun dalam bentuk sederhana. Diharapkan entitas UMKM skala Kecil dapat mencapai tahapan ini.

Tahap kelima adalah penyusunan laporan keuangan yang *auditable*. Tahap ini diupayakan dapat dicapai oleh UMKM skala menengah sehingga peran mahasiswa adalah membantu menyusun laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga akan menjadi laporan keuangan yang *auditable*.

Kelima tahapan di atas sebagai tahap pengimplementasian peran mahasiswa akuntansi di dalam gerakan KKN yang dimodifikasi tersebut akan dijalankan selama kurang lebih satu (1) bulan masa KKN. Mahasiswa akuntansi nantinya akan menjalankan tahap pertama dan kedua pada minggu pertama, tahap ketiga pada minggu kedua dan seterusnya. Sehingga setelah kelima tahapan terpenuhi diharapkan akan mampu mengarahkan pelaku UMKM untuk melakukan akses kepada keuangan melalui perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Artikel konseptual ini memaparkan Indonesia sebagai bagian dari MEA memiliki sektor UMKM dengan kuantitas yang besar tetapi tidak disertai dengan kualitas yang memadai. Kendala/*gap* yang menyebabkan kurang memadainya UMKM, salah satunya berhubungan dengan keuangan dalam hal ini berkaitan dengan akuntansi, yakni *gap* informasi, *gap* formalitas dan *gap* skala usaha.

Solusi atau penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi *gap* tersebut; (1) dengan memanfaatkan peran mahasiswa akuntansi sebagai bagian yang dianggap memiliki kompetensi sekaligus menggunakan kesempatan ini bagi mahasiswa untuk merealisasikan pemahaman akan ilmu akuntansi yang diterima dalam perkuliahan, (2) peran mahasiswa akuntansi tersebut dilaksanakan dalam KKN yang dimodifikasi di mana perubahan pada KKN tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa akuntansi. Terdiri dari tiga tahap untuk mendorong pelaku UMKM khususnya skala mikro dan kecil yang dianggap belum mampu atau bahkan belum melakukan pencatatan transaksi bisnisnya untuk dapat melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan.

Saran untuk kedua solusi yang ditawarkan adalah peran mahasiswa akuntansi dalam mengatasi ketiga *gap* yang ada memerlukan pengarahan/bimbingan yang optimal dari akademisi seperti dosen agar mahasiswa memiliki kompetensi yang baik serta sebagai gerakan yang memodifikasi KKN yang sudah dijalankan sedemikian rupa dari tahun ke tahun, tentu diperlukan bantuan berbagai pihak. Bantuan tersebut terutama sehubungan dengan penentuan lokasi atau daerah KKN yang juga membutuhkan pelaku UMKM sesuai kriteria sebagai sarannya. Dukungan dari pihak fakultas terkait juga sangat dibutuhkan untuk dapat memberi pembekalan yang memadai kepada mahasiswa akuntansi sebagai pemeran utama dalam gerakan untuk mempersiapkan UMKM bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

REFERENSI

- Bank Indonesia. 2009. *Buku Kajian Mengenai Rumusan Standar Minimum Laporan Keuangan*. www.bi.go.id. Diunduh tanggal 20 Juni 2015.
- Baswir, R. 2013. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Budhiyanto, S. J. dan Nugroho, I. P. 2004. Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. X, No.2, Hal.260-281.
- UMN. *Pengembangan UMKM Bali*. www.bumn.go.id. Diunduh tanggal 20 Juli 2015.
- Departemen Koperasi. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Artikel *Online*. <http://www.depkop.go.id/>. Diunduh tanggal 4 Agustus 2015.
- Hadiyati, E. 2010. *Pemasaran untuk UMKM (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Malang: Bayumedia.
- Hamonangan, S. H. 2014. Peran Perguruan Tinggi Mempersiapkan Mahasiswa Menghadapi AEC 2015. Suaramahasiswa.com. Diunduh pada tanggal 22 Desember 2015.

- Jusup, A. H. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi: Jilid 1*. Yogyakarta: STIE.
- Kementerian Koperasi dan UMKM. 2012. *Data kontribusi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tahun 2012*. Jakarta.
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 2009. *Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) UU RI No. 20 Tahun 2008*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peluang dan Tantangan Indonesia Pada ASEAN Economic Community 2015*. *Artike Online*. <http://www.setneg.go.id/>. Diunduh tanggal 4 Agustus 2015.
- Mankiw, N. G. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Asia, Volume 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Raja, O., dkk. 2010. *Kita Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 2004. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, A. 2014. *Pertumbuhan Ekonomi & Kemiskinan*. Jakarta: Republika.
- Stel, C. dan Thurik, Z. 2004. *The Effect of Entrepreneurship on National Economic Growth: an Analysis Using the GEM Database*. SCALES Paper No. 320.
- Scarborough, N. M. dan Zimmerer, T.W. 2005. *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Fourth Edition*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Sukirno, S. 2008. *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wati, E.____. *Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia*. *Artikel Online*. www.academica.edu. Diunduh tanggal 4 agustus 2015.